

POLICY BRIEF

**Dari Bantuan Konsumtif ke Pemberdayaan :
Strategi Penurunan Kemiskinan Kabupaten Balangan**

Ditujukan Kepada :
Bupati -
Dinas Sosial -
Bapperida -
BPKPAD -



1 Ringkasan Eksekutif

Tingkat kemiskinan Kabupaten Balangan tahun 2024 tercatat 4,87 persen, lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan (4,11 persen). Meskipun cenderung menurun, kemiskinan belum berkurang secara signifikan dan berkelanjutan, serta masih ditandai oleh kerentanan rumah tangga miskin.

Berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan, namun dampaknya belum optimal karena masih bersifat sektoral dan berorientasi pada bantuan konsumtif jangka pendek. Berdasarkan analisis akar masalah dan *grid analysis*, kebijakan perlu difokuskan pada pergeseran bantuan ke pemberdayaan berkelanjutan, penguatan integrasi lintas OPD, dan peningkatan ketepatan sasaran. Melalui pembenahan kebijakan, data, dan koordinasi pada jangka pendek serta penguatan sistem dan evaluasi berbasis outcome pada jangka menengah, diharapkan penurunan kemiskinan dapat dicapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Integrasi Program, Ketepatan Sasaran, Pemberdayaan Berkelanjutan

2 Pendahuluan

**PERSENTASE PENDUDUK MISKIN
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2024**



Keterangan : Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Balangan Tahun 2024 Sebesar 4,87 %
Peringkat ke 4 dari 13 Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Selatan Dengan Nilai Kemiskinan Tertinggi

Sumber : <https://bps.go.id>

Kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah, termasuk di Kabupaten Balangan. Pada tahun 2024, persentase penduduk miskin di Kabupaten Balangan tercatat sebesar 4,87 persen, yang menempatkannya pada peringkat ke-4 tertinggi dari 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Balangan masih relatif tinggi dibandingkan dengan sebagian besar daerah lain di provinsi yang sama.

Lebih lanjut, persentase penduduk miskin Kabupaten Balangan tersebut juga masih berada di atas rata-rata persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Selatan, yang pada tahun 2024 tercatat sebesar 4,11 persen. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan capaian pembangunan sosial-ekonomi antara

Kabupaten Balangan dan rata-rata provinsi, serta mencerminkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di daerah ini belum sepenuhnya optimal.

Situasi tersebut menuntut perhatian serius dari pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan terkait untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, terintegrasi, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, policy brief ini disusun untuk mengkaji kondisi kemiskinan di Kabupaten Balangan serta memberikan rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat mendukung percepatan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih efektif.

3 Deskripsi Masalah

BAPPERIDA Kabupaten Balangan melaksanakan evaluasi kajian penanggulangan kemiskinan pada 23 Desember 2025 sebagai dasar penguatan kebijakan berbasis bukti. Kajian menegaskan kemiskinan bersifat multidimensi dan meski trennya menurun, tantangan kemandirian ekonomi Rumah Tangga Miskin (RTM) masih kuat. Hasilnya diharapkan menjadi acuan lintas perangkat daerah untuk penanganan kemiskinan yang berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Sosial terus menurunkan angka kemiskinan melalui program Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dalam tiga tahun terakhir, angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan, dengan 120 KPM menerima bantuan modal usaha Rp. 2,5 juta yang disertai pendampingan dan pengawasan. Program ini dinilai efektif karena bantuan diarahkan untuk usaha produktif dan berkelanjutan.

Namun demikian, penurunan angka kemiskinan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kemandirian ekonomi Rumah Tangga Miskin (RTM) secara berkelanjutan. Sebagian program masih berorientasi pada bantuan jangka pendek dan belum sepenuhnya terintegrasi antar perangkat daerah. Pendampingan dan pengawasan telah dilakukan, tetapi keterbatasan kapasitas usaha, akses pasar, permodalan lanjutan, serta keterampilan kewirausahaan masih menjadi kendala utama bagi RTM untuk keluar secara permanen dari kemiskinan.

Selain itu, tantangan koordinasi lintas sektor, pemutakhiran data penerima manfaat, serta monitoring dan evaluasi berbasis hasil (outcome) menyebabkan efektivitas program belum optimal. Tanpa penguatan sinergi kebijakan dan inovasi berbasis potensi lokal, penurunan kemiskinan berisiko bersifat sementara dan tidak berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan peninjauan dan penguatan kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Balangan agar lebih terintegrasi, berorientasi pada pemberdayaan dan kemandirian ekonomi, serta mampu memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi merespons kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai regulasi dan inovasi program lintas 14 OPD. Penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi multistakeholder dan inovasi kebijakan yang tertuang dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan 2021–2026 berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 20% (2009) menjadi 7,08% (2021), tertinggi di Jawa Timur.

KONDISI KEMISKINAN DI KABUPATEN BALANGAN, MARET 2024



Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, 2014-2024



Indikator Kemiskinan Kabupaten Balangan, Maret 2024

Tingkat Kedalaman
Kemiskinan (P1)

0,849

Indeks Keparahan
Kemiskinan (P2)

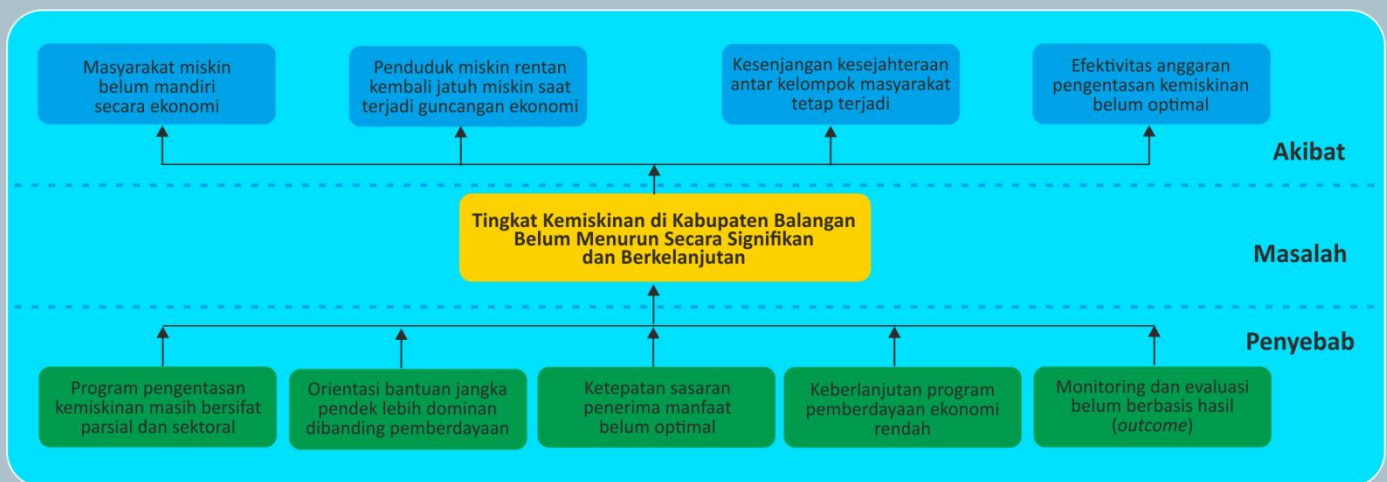
0,200

Garis Kemiskinan

528.104
Rupiah/kapita/bulan

Sumber : <https://balangankab.bps.go.id>

Dalam merumuskan masalah penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Balangan, *tools* yang digunakan adalah metode *problem tree*, sebagai berikut :



4 Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis akar masalah melalui *Problem Tree*, berikut adalah rekomendasi kebijakan strategis yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Balangan untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Balangan :

01

Penguatan Integrasi Program Pengentasan Kemiskinan. Mengintegrasikan program lintas OPD (sosial, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, UMKM, perumahan) dalam satu *kerangka penanggulangan kemiskinan terpadu*. Menguatkan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sebagai pengendali kebijakan dan anggaran.

02

Reorientasi Bantuan dari Konsumtif ke Pemberdayaan Berkelanjutan. Mengurangi dominasi bantuan jangka pendek dan meningkatkan proporsi program : peningkatan keterampilan kerja, pengembangan UMKM berbasis potensi lokal, pendampingan usaha secara berkelanjutan. Menerapkan *exit strategy* bagi penerima bantuan sosial agar bertransformasi menjadi mandiri.

03

Peningkatan Ketepatan Sasaran Penerima Manfaat. Pemutakhiran dan sinkronisasi data kemiskinan daerah (DTKS dan data sektoral) secara berkala. Pemanfaatan *by name by address* dan teknologi digital untuk verifikasi penerima manfaat. Pelibatan desa/kelurahan dalam validasi data.

04

Penguatan Keberlanjutan Program Pemberdayaan Ekonomi. Pendampingan berkelanjutan pasca-bantuan (*coaching* usaha, akses pasar, akses permodalan). Pengembangan klaster ekonomi lokal berbasis desa (pertanian, UMKM, ekonomi kreatif). Kemitraan dengan sektor swasta dan BUMD.

05

Transformasi Monitoring dan Evaluasi Berbasis *Outcome*. Mengubah pendekatan Monev dari sekadar serapan anggaran (*output*) menjadi capaian hasil (*outcome*). Menetapkan indikator keberhasilan yang jelas, seperti: peningkatan pendapatan, penurunan jumlah rumah tangga miskin, peningkatan status kesejahteraan penerima program. Evaluasi tahunan sebagai dasar perbaikan kebijakan.

Menggunakan teknik kategorisasi kriteria alternatif dari Bardach (2012) dan Dunn (2003), dengan memasukkan berbagai alternative solusi kedalam kriteria: *Efektifitas, Efisiensi, Political Viability, Administrative Operability*.

Matrik 1. Alternatif Kebijakan Berdasarkan Analisa Grid

Alternatif Solusi*	Kriteria				Total	Prioritas
	Efektifitas (20%)	Efisiensi (30%)	Political Viability (20%)	Administrative Operability (30%)		
Penguatan Integrasi Program Pengentasan Kemiskinan	1,7	2,4	1,6	2,5	8,2	2
Reorientasi Bantuan dari Konsumtif ke Pemberdayaan Berkelanjutan	1,8	2,6	1,7	2,3	8,4	1
Peningkatan Ketepatan Sasaran Penerima Manfaat	1,4	2,4	1,6	2,5	7,9	3
Penguatan Keberlanjutan Program Pemberdayaan Ekonomi	1,6	2,4	1,4	2,2	7,4	5
Transformasi Monitoring dan Evaluasi Berbasis <i>Outcome</i>	1,7	2,1	1,6	2,4	7,8	4

*skor alternatif pada setiap kriteria antara 1 (kesulitan penerapan sangat tinggi) sampai dengan 10 (kesulitan penerapan sangat rendah)

Dengan menggunakan Grid Analysis berdasar kriteria diatas, rekomendasi kebijakan yang prioritas dilakukan sebagai berikut :

01

Milestone jangka pendek, Tetapkan kebijakan pergeseran bantuan konsumtif ke pemberdayaan, Jalankan pilot bantuan produktif berbasis usaha/skill, Bentuk tim lintas OPD dan petakan integrasi program kemiskinan, Validasi dan pemutakhiran data penerima manfaat (DTKS), Susun indikator kinerja berbasis outcome.

02

Milestoner jangka menengah, Perluas bantuan pemberdayaan secara terintegrasi dan berkelanjutan, Terapkan satu sistem perencanaan dan pelaporan program kemiskinan, Kurangi dominasi bantuan konsumtif dalam APBD, Implementasi monitoring dan evaluasi berbasis outcome, Capai penurunan kemiskinan yang terukur dan berkelanjutan.

Kesimpulan : Pengentasan kemiskinan perlu difokuskan pada pergeseran bantuan konsumtif ke pemberdayaan berkelanjutan, penguatan integrasi program, dan peningkatan ketepatan sasaran. Melalui pembenahan kebijakan, data, dan koordinasi pada jangka pendek, serta penguatan sistem dan evaluasi berbasis outcome pada jangka menengah, diharapkan penurunan kemiskinan dapat dicapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

5 Daftar Pustaka

- <https://www.bps.go.id/id> (2025)
- <https://lenterakalimantan.com/2024/05/sejahterakan-warga-balangan-dinsos-berupaya-turunkan-angka-kemiskinan-melalui-kpm/>
- <https://www.instagram.com/p/DSo0s51kaLy/>
- Emi Hidayati and Fitriatul Masrurroh, POVERTY REDUCTION BEST PRACTICES IN BANYUWANGI REGENCY, 2 (2023).
- Bardach, E. (2012). " A Practical Guide For Policy Analysis The Eight Fold Path To More Effective Problem Solving, 4th edition". Washington DC: Sage.
- Dunn, William. (2003). "Pengantar Analisis Kebijakan Publik". Yogyakarta: Gajah Mada University Press.